

BAB I

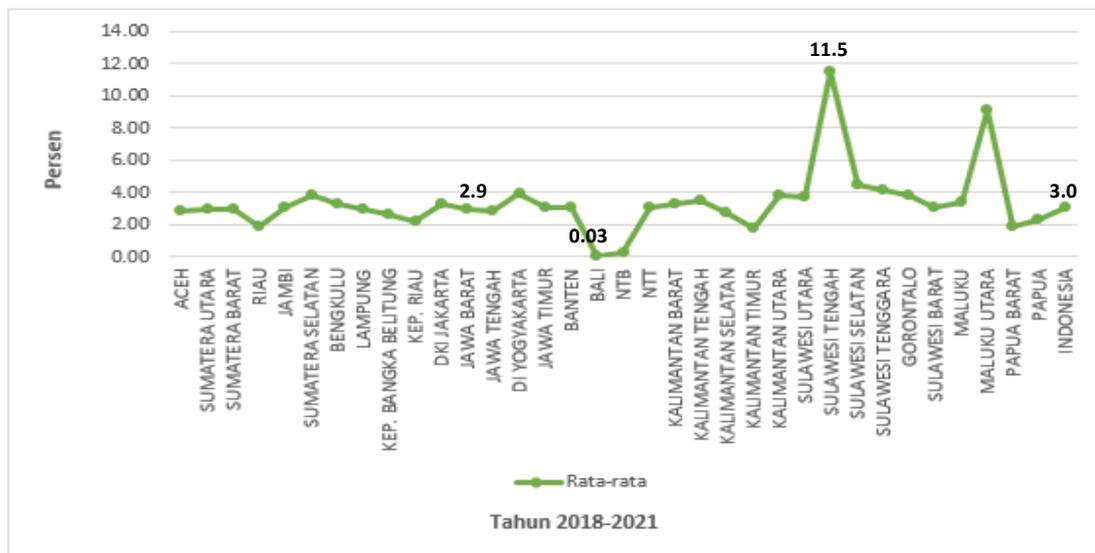
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan pertumbuhan yang maksimal dengan diikuti oleh pengurangan tingkat kemiskinan, perbaikan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah salah satunya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perekonomian, dimana kinerja tersebut merupakan hasil dari usaha dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Sedangkan kualitas pembangunan manusia merupakan objek serta subjek dalam sebuah pembangunan suatu wilayah, dimana manusia menjadi sasaran utama sekaligus pelaku dalam sebuah pembangunan. Dengan demikian, terciptanya kualitas pembangunan manusia yang tinggi menjadi faktor penting dalam sebuah pembangunan ekonomi.

Relasi antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dari dua arah, dimana pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan persediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan manusia, begitupun tingkat kualitas pembangunan manusia yang tinggi dapat menentukan kemampuan

penduduk suatu daerah dalam melakukan pengelolaan serta penyerapan yang menjadi sumber-sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian di dalam memproduksi barang dan jasa suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (Putu Ayu, 2014). Ukuran yang digunakan untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perbandingan antara selisih PDRB tahun tertentu dan tahun sebelumnya dengan PDRB tahun sebelumnya dikali 100%. Berikut merupakan perkembangan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional selama 4 tahun terakhir dari tahun 2018-2021.



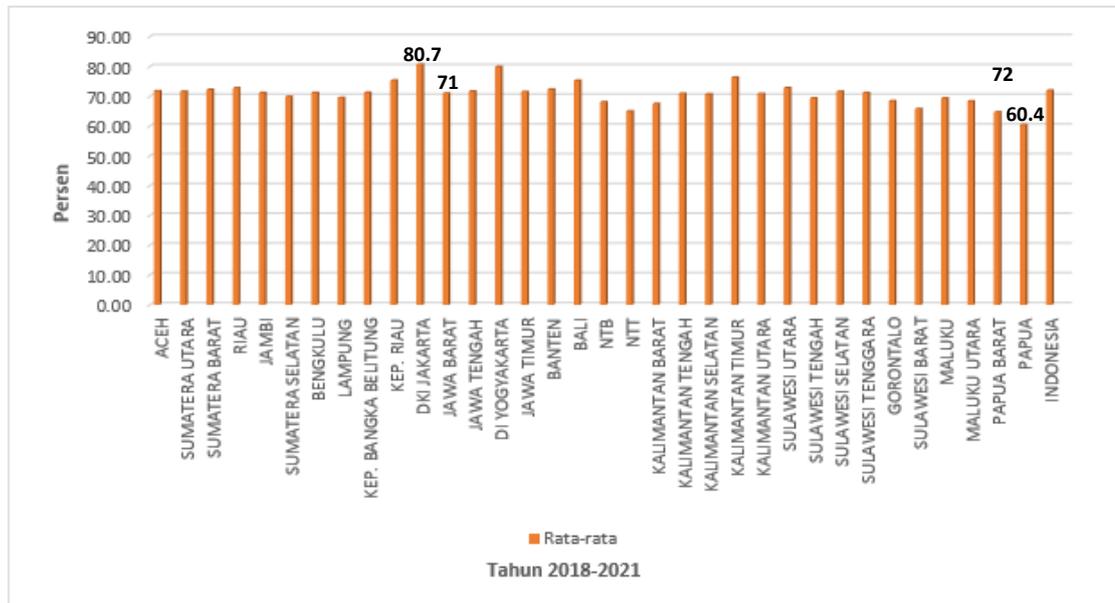
Gambar 1.1
Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional
Tahun 2018-2021

Sumber : BPS 2022 ([Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB ADHK, menurut Provinsi-Provinsi di Indonesia 2018-2021)

Berdasarkan gambar 1.1 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi secara nasional selama 4 tahun terakhir yaitu sebesar 3,0%. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 4 tahun terakhir yaitu Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 11,5% sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah selama 4 tahun terakhir yaitu Provinsi Bali sebesar 0,03%. Adapun Provinsi Jawa Barat rata-rata laju pertumbuhan ekonominya berada pada peringkat ke-21 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan ekonominya sebesar 2,9% dan tentu masih berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat masih harus ditingkatkan terutama dari sisi domestik yaitu melalui konsumsi rumah tangganya, dari sisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta dari sisi lapangan usaha melalui berbagai sektor terutama pada industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut selain masih harus dilakukan di Provinsi Jawa Barat, juga harus dilakukan di daerah-daerah yang ada di provinsi tersebut, karena hasil perekonomian setiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat akan menentukan kondisi perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan untuk melihat perkembangan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah berdasarkan *The United Nations Development Programme* (UNDP) disebut *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran yang digunakan dalam mengukur capaian pembangunan manusia yang terdiri dari tiga komponen dasar yaitu umur yang panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Masing-masing ketiga komponen tersebut terdiri dari dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, serta dimensi ekonomi. Tolak ukur IPM berkisar antara 0 – 100. Apabila nilai IPM suatu daerah mendekati angka 100 maka menggambarkan pembangunan manusianya semakin baik, begitupun sebaliknya apabila nilai IPM suatu daerah menjauhi angka 100 menggambarkan pembangunan manusianya kurang baik. Berikut merupakan perkembangan rata-rata indeks pembangunan manusia Provinsi dan Nasional selama 4 tahun terakhir dari tahun 2018–2021.



Gambar 1.2
Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional
Tahun 2018 – 2021

Sumber : BPS 2022, ([Metode Baru] IPM menurut Provinsi, 2018 -2021)

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa rata-rata IPM secara nasional selama 4 tahun sebesar 72%. Rata-rata IPM tertinggi selama 4 Tahun terakhir yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata IPM berada pada nilai 80,7%. Sedangkan provinsi yang memiliki rata-rata IPM terendah yaitu Provinsi Papua sebesar 60,4%. Adapun Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-10 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia dengan rata-rata nilai IPM sebesar 71%. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat masih menjadi masalah yang serius bagi pemerintah. Terbukti Dengan nilai rata-rata IPM nya yang masih dikatakan cukup jauh dari angka 100%, sehingga hal tersebut menggambarkan bahwa kualitas pembangunan manusia yang berada di Provinsi Jawa Barat masih kurang baik. Hal ini diakibatkan pula karena ukuran yang menjadi indikator

penentu IPM yang terdiri atas kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat masih belum menunjang kualitas pembangunan manusia yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, faktor-faktor lain seperti tingkat penyerapan tenaga kerja, serta modal manusia dalam hal ini yaitu pendidikan serta kesehatan perlu diperhatikan pula karena kesehatan dan pendidikan memiliki peranan yang penting terutama di negara berkembang dalam membentuk kemampuan untuk melakukan penyerapan teknologi serta mengembangkan kapasitasnya, sehingga akan terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Upaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia tersebut tidak hanya dilakukan di Provinsi Jawa Barat saja tetapi lebih ditekankan di daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, karena kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat bergantung pada kualitas pembangunan manusia di Kabupaten/Kota yang berada di provinsi tersebut. Selain itu, pemerintah setiap daerah diharapkan untuk berlomba dengan pemerintah daerah yang lain dalam meningkatkan kualitas pembangunannya. Hal ini dikarenakan bahwa tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia di setiap daerah juga akan berpengaruh terhadap dana yang akan diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan pembiayaan dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat yang nantinya akan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kehidupan yang layak yang diwujudkan dalam bentuk dana transfer daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

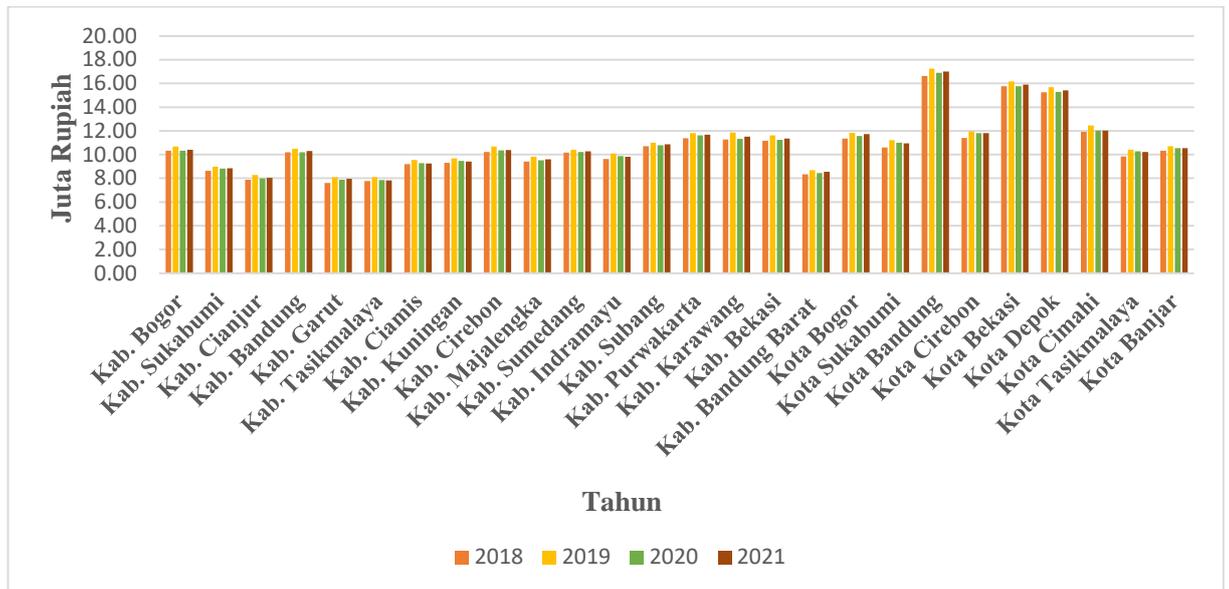
Oleh karena itu, dalam mencapai pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibutuhkan tingkat pembangunan manusia yang tinggi, sebab pembangunan

manusia bisa memberikan kemampuan penduduknya dalam penyerapan serta pengelolaan yang menjadi sumber–sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi yang digunakan sebagai sarana yang penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung juga dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Santi Nurmainah, 2013) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga keduanya tidak bisa langsung dihubungkan secara linier, namun dapat ditentukan oleh faktor–faktor apa saja yang menghubungkan kedua konsep tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh (Ranis dkk, 2000) dalam (Moh Muqorrobin, 2017) bahwa faktor penentu antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia meliputi distribusi pendapatan yang merata, serta peningkatan kualitas modal manusia yang bisa dilihat dari sisi kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan dan kesehatan merupakan indikator yang termasuk kedalam kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat yang bisa dilihat dari kondisi rumah yang layak, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, pendidikan serta kesehatan (P.Todaro dan Stephen C. Smith, 2006). Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan masyarakatnya semakin baik. Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat, digunakan indikator kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat yaitu ukuran yang digunakan untuk melihat apakah masyarakat suatu wilayah tersebut dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Ada

beberapa indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS,2022) menyatakan bahwa beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya indikator Pola Konsumsi, Ketenagakerjaan, Kesehatan, serta Pendidikan.

Dalam teori Keynes dikatakan bahwa besar kecilnya konsumsi rumah tangga bergantung kepada besar kecilnya pendapatan, dimana besar kecilnya pendapatan tersebut dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan, pendapatan adalah salah satu komponen yang digunakan dalam perhitungan indeks pembangunan manusia. Selain itu, di dalam teori Keynes dalam (Andi haib, 2019) disebutkan pula bahwa pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh besar kecilnya pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga, karena dengan adanya kenaikan dalam aktivitas konsumsi maka produksi akan barang konsumsi tersebut ikut meningkat yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga yaitu jumlah pengeluaran rata-rata barang dan jasa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berikut merupakan perkembangan pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun terakhir dari tahun 2018-2021.



Gambar 1.3
Pengeluaran Rata – rata Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2021 (Juta Rupiah/Tahun)

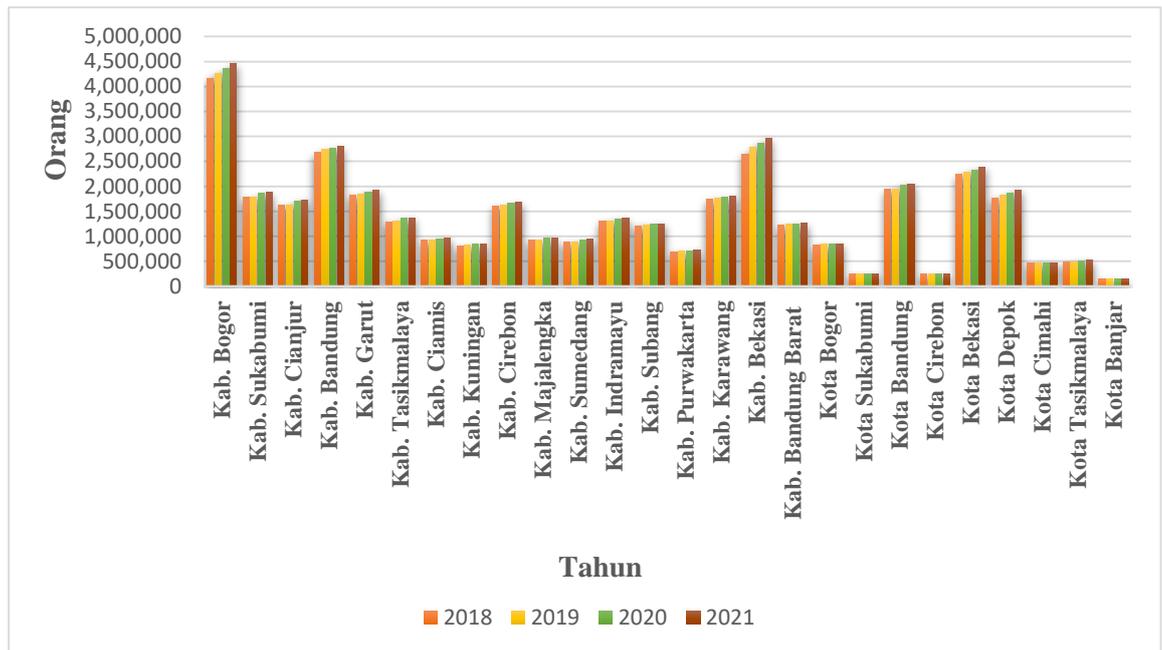
Sumber : BPS 2022 (Rata- rata pengeluaran perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, 2018 – 2021)

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pengeluaran rata–rata konsumsi rumah tangga di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pengeluaran rata–rata Konsumsi rumah tangga paling tinggi pada tahun terakhir yaitu tahun 2021 berada di Kota Bandung dengan nilai pengeluaran sebesar 17 juta rupiah. Sedangkan nilai pengeluaran rata–rata konsumsi rumah tangga paling rendah pada tahun terakhir berada di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 7,83 juta rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa khususnya di daerah yang memiliki pengeluaran rata–rata konsumsi rumah tangga paling tinggi, mencerminkan jumlah pendapatan masyarakatnya semakin tinggi, selain itu dengan meningkatnya jumlah

pendapatan di daerah–daerah tersebut menggambarkan bahwa penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut juga tinggi sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang masyarakat miliki dan tentunya dampak terhadap pembangunan serta pertumbuhan ekonominya pun akan semakin baik. Seperti pendapat Keynes (Telisa, 2019:190) yang mengutarakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi rumah tangga bergantung terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat dalam rumah tangga tersebut. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi rumah tangganya, begitupun sebaliknya.

Selanjutnya, ukuran yang digunakan di dalam indikator kesejahteraan masyarakat yaitu ketenagakerjaan. Di dalam teori pertumbuhan Neo klasik disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung kepada perkembangan faktor–faktor produksinya, diantaranya faktor modal, tenaga kerja, serta teknologi. Menurut UU. No. 13 tahun 2003 Bab 1 pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa, dalam rangka memenuhi kebutuhan baik diri sendiri ataupun masyarakat. Berikut merupakan perkembangan jumlah tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun terakhir dari 2018–2021.



Gambar 1.4
Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018–2021 (Orang)

Sumber : BPS 2022 (Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, 2018–2021)

Berdasarkan gambar 1.4 tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tenaga kerja yang paling tinggi berada di Kabupaten Bogor pada tahun 2021 sebanyak 4.454.407 orang. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit pada tahun 2021 yaitu Kota Banjar sebanyak 147.298 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah tenaga kerja paling tinggi menggambarkan bahwa jumlah populasi di daerah tersebut semakin banyak sehingga tingkat penyerapan tenaga kerjanya pun semakin tinggi.

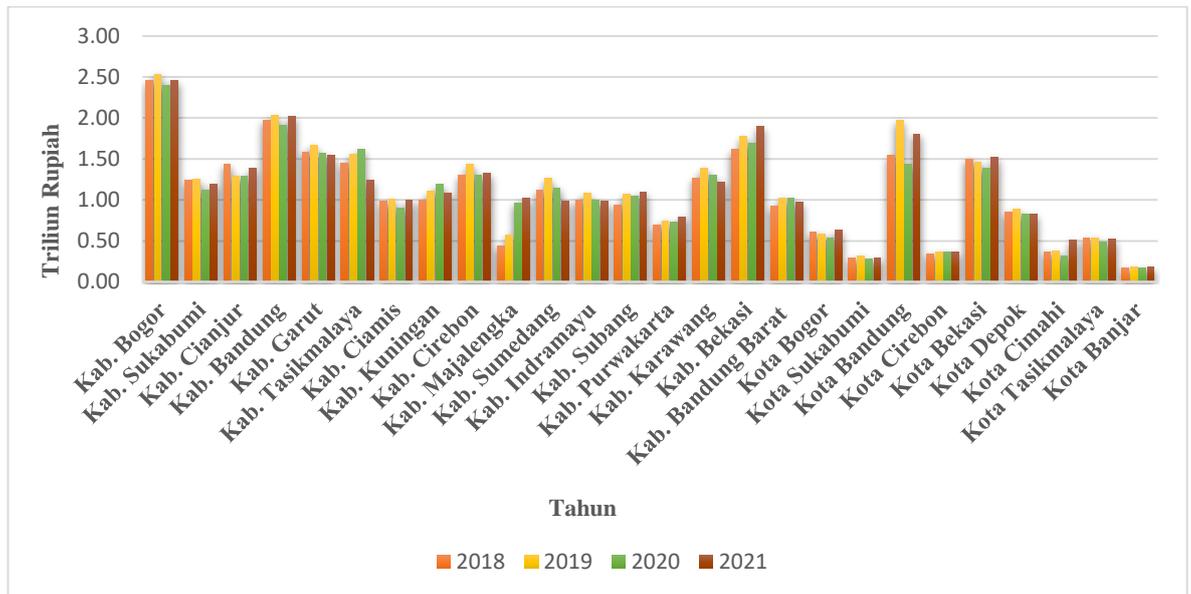
Seperti yang dikatakan dalam teori Solow dalam (Mutia sari dkk, 2016) bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan tenaga

kerjanya, dengan melihat jumlah populasinya. Dimana jumlah populasi tersebut dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dengan sendirinya dan secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menurut Samuelson serta Nordhaus (2001) dalam (Citra Ayu Basica E.L, 2014) mengatakan bahwa yang menjadi input tenaga kerja yaitu kualitas serta keterampilan masyarakatnya. Yang dimaksud dengan kualitas tersebut yaitu keterampilan, pengetahuan, serta kedisiplinan. Dimana, dengan meningkatnya kualitas dan keterampilan tersebut maka akan meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Dengan tingginya produktivitas tersebut maka akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas yang pada akhirnya akan memperoleh hasil produksi yang banyak. Dengan banyaknya hasil produksi tersebut maka pendapatan yang diterima pun akan semakin besar dan tentunya konsumsinya pun akan semakin naik. Naiknya pendapatan serta konsumsi akan memberikan dampak terhadap pembangunan manusianya. Karena dengan meningkatnya jumlah dan produktivitas tenaga kerja di suatu daerah maka hal tersebut menggambarkan bahwa kualitas pembangunan manusianya pun semakin baik.

Selanjutnya ukuran yang digunakan pada indikator kesejahteraan masyarakat yaitu dari sisi pendidikan serta kesehatan. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005:163) dalam (Merlin Anggraeni, 2017) ada empat faktor yang dapat dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, diantaranya sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), pembentukan modal dan teknologi. Peningkatan terhadap sumber daya manusia dapat dilakukan melalui cara dengan memperbaiki kualitas pembentukan modal manusianya, karena modal manusia merupakan

bagian yang penting dalam melihat pembangunan ekonomi, dimana modal manusia tersebut bisa dilihat dari sisi sosialnya diantaranya membutuhkan kehidupan yang layak dengan cara pendidikan. Sehingga Pendidikan merupakan aspek yang menjadi dasar dalam pembangunan suatu daerah.

Untuk mendukung aspek pendidikan di dalam suatu pembangunan, salah satunya dibutuhkan melalui anggaran. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam menerapkan aspek pendidikan bisa melalui pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Hal ini dikarenakan, pengeluaran pemerintah dapat dijadikan sebagai cerminan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dengan adanya dukungan dari pengeluaran pemerintah di sektor tersebut, diharapkan pengeluaran pemerintah tersebut dapat meningkatkan kualitas modal manusia dalam suatu pembangunan, sehingga apabila kualitas modal manusia meningkat maka hal ini akan menyebabkan kualitas pembangunan manusianya meningkat dan pertumbuhan ekonominya pun ikut meningkat. Berikut merupakan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan selama 4 tahun terakhir dari 2018–2021 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.5
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Kab/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2021 (Triliun Rupiah)

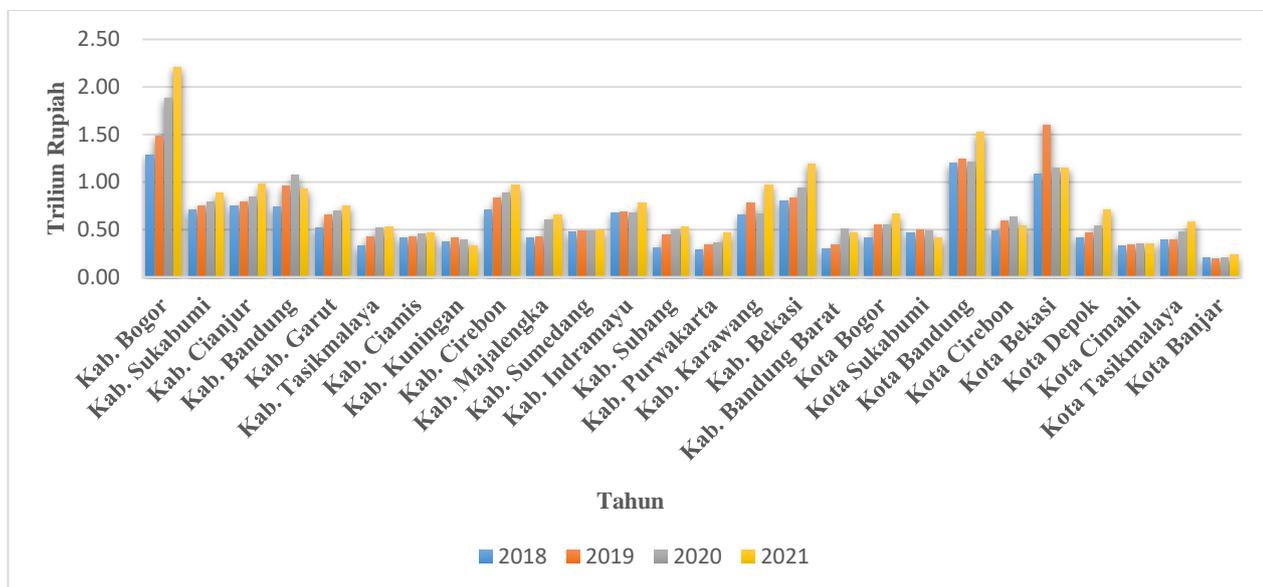
Sumber : DJPK Kemenkeu 2021 (Realisasi Belanja Pemerintah per Fungsi, 2018–2021)

Berdasarkan gambar 1.5 pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pengeluaran pemerintah dari sektor pendidikan sebagian besar hampir semuanya mengalami peningkatan setiap tahunnya namun ada beberapa daerah yang justru mengalami penurunan disetiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan paling besar tahun 2021 yaitu Kabupaten Bogor sebesar 2,46 triliun rupiah. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan paling rendah tahun 2021 yaitu Kota Banjar sebesar 0,18 triliun rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki nilai pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang tinggi menggambarkan bahwa pemerintah telah

melakukan upaya dalam meningkatkan sumber modal manusia dalam bentuk sektor pendidikan, dengan meningkatnya modal manusia tersebut maka kualitas pembangunan manusianya pun akan naik, selain itu modal manusia juga merupakan input dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya untuk daerah yang memiliki nilai pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan yang rendah, menggambarkan bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam upaya meningkatkan sumber daya manusianya. Sehingga hal tersebut menjadi tugas pemerintah, khususnya pemerintah di daerah tersebut untuk lebih memprioritaskan mengenai kebutuhan ataupun faktor yang mejadi penentu dalam peningkatan sumber daya manusia, khususnya dari bidang pendidikan.

Selain itu, modal manusia yang merupakan bagian penting dalam melihat pembangunan ekonomi, selain bisa dilihat dari sisi sosialnya yaitu dengan cara membutuhkan kehidupan yang layak melalui pendidikan, juga bisa dilakukan melalui kesehatan. Hal ini dikarenakan modal manusia juga bisa digunakan dalam menerangkan jenis investasi manusia, yakni berupa investasi yang bisa mengarahkan ke arah populasi yang lebih sehat. Sehingga selain pendidikan, kesehatan juga merupakan aspek yang menjadi dasar dalam pembangunan suatu daerah. Untuk mendukung aspek kesehatan tersebut, maka dibutuhkan juga salah satunya melalui anggaran pemerintah bidang kesehatan. Sehingga dengan adanya dukungan dari pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan tersebut, diharapkan hal tersebut dapat mampu meningkatkan kualitas modal manusia dari segi kesehatan. Berikut merupakan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan selama 4 tahun terakhir dari 2018–2021 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.6
Pengeluaran Pemerintah Sekor Kesehatan Kab/Kota Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2021 (Triliun Rupiah)

Sumber : DJPK Kemenkeu 2021 (Realisasi Belanja Pemerintah per Fungsi, 2018 – 2021)

Berdasarkan gambar 1.6 pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sebagian besar hampir semuanya mengalami kenaikan setiap tahunnya namun ada beberapa daerah yang justru mengalami penurunan disetiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan paling besar tahun 2021 yaitu Kabupaten Bogor sebesar 2,21 triliun rupiah. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan paling rendah tahun 2021 yaitu Kota Banjar sebesar 0,23 triliun rupiah.

Hal ini menunjukkan pula bahwa daerah yang memiliki nilai pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang tinggi menggambarkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya dalam meningkatkan sumber modal manusia dari sisi kesehatan. Sebaliknya, untuk daerah yang memiliki nilai pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan yang rendah, menggambarkan bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam upaya meningkatkan sumber daya manusianya terutama dalam sektor kesehatan. Sehingga hal tersebut juga masih menjadi tugas pemerintah, khususnya pemerin daerah tersebut untuk lebih memprioritaskan mengenai kebutuhan ataupun faktor yang mejadi penentu dalam peningkatkan sumber daya manusia, khususnya dari bidang kesehatan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga, tenaga kerja, serta pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari indikator kesejahteraan masyarakat yang mempunyai peran penting terhadap kualitas pembangunan manusia. Tinggi rendahnya kualitas pembangunan manusia tersebut juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dimana pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan bagian yang saling berhubungan dalam menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi di suatu wilayah khususnya di Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai paparan yang sudah dijelaskan di atas dengan judul penelitian **“Pengaruh Indikator Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 – 2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012–2021?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan di atas diantaranya :

1. Untuk mengetahui perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012–2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan di bidang kajian ilmu ekonomi terutama kajian mengenai pengaruh indikator kesejahteraan masyarakat terhadap indeks pembangunan manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis itu sendiri digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi terkait dengan penelitian yang akan dilakukannya baik dari segi teori ataupun sumber data yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya.